



Agenda setting kebijakan pembangunan kesehatan global dan relevansi ketahanan bangsa

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto¹

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kota Kediri, Indonesia
hanyaujianini@gmail.com¹

ABSTRACT

Implementing the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) often encounters problems in the services provided. Therefore, agenda setting is needed to provide solutions to these problems. This research aims to discover the agenda setting in global health development and the role of actors in health services. Qualitative methods, with a literature study approach and content analysis, were used to answer research questions. The results showed the lack of BPJS effectiveness in several internal BPJS health problems and external problems for residents who have not participated in the health resilience program coordinated by BPJS Health, which has become a public problem. The achievement of public health resilience through the BPJS role mechanism is based on public values, namely first, justice for the public to get health facilities with easy access to health facilities; Second, equality to increase community resilience in the health sector by increasing professionalism in health services; Third, the openness of the BPJS role in improving community health resilience in the health sector; and Fourth, health promotion efforts and disease prevention through cooperation.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 20 Dec 2022

Revised: 24 May 2023

Accepted: 2 Jun 2023

Available online: 13 Jun 2023

Publish: 23 Jun 2023

Keywords:

agenda setting; health resilience;
public issues; public values

Open access

Jurnal Abmas

is a peer-reviewed open-access journal

ABSTRAK

Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sering menjumpai permasalahan dalam pelayanan yang diberikan. Maka dari itu, diperlukan agenda setting untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui agenda setting dalam pembangunan kesehatan secara global dan peran aktor dalam layanan kesehatan. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya efektivitas BPJS pada beberapa permasalahan internal BPJS Kesehatan dan masalah eksternal pada warga yang belum mengikuti program ketahanan kesehatan yang dikoordinir BPJS Kesehatan ini pada muaranya menjadi masalah publik. Capaian ketahanan kesehatan masyarakat melalui mekanisme peranan BPJS berdasarkan nilai-nilai kepublikan, yaitu 1) Keadilan bagi publik mendapatkan fasilitas kesehatan dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan; 2) Persamaan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan; 3) Keterbukaan peran BPJS dalam meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat bidang kesehatan; dan Keempat, upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui kerja sama.

Kata Kunci: agenda setting; ketahanan kesehatan; masalah publik; nilai-nilai kepublikan

How to cite (APA Style)

Satiadharmanto, D. F. (2023). Agenda setting kebijakan pembangunan kesehatan global dan relevansi ketahanan bangsa. *Jurnal Abmas*, 23(1), 23-28.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright

2023, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: hanyaujianini@gmail.com

INTRODUCTION

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 mencerminkan aspirasi masyarakat untuk memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan jaminan perlindungan kesehatan. Visi ini adalah bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan memperoleh jaminan kesehatan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketahanan kesehatan menjadi fokus utama sebagai implementasi amanat konstitusi. Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan dalam situasi darurat dan bencana, serta memastikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan etika profesi. Namun, dalam perjalanan implementasinya, BPJS Kesehatan menghadapi berbagai tantangan terutama terkait masalah kepesertaan dan pemberi layanan kesehatan. Masalah kepesertaan seringkali timbul ketika masyarakat menghadapi situasi sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baru muncul pada saat-saat tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami isu-isu tersebut dan merumuskan langkah-langkah konstruktif (Putri & Murdi, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan Diskresi birokrasi dapat dilakukan untuk menunjang pelayanan dalam pemerintahan daerah (Malik, 2019). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebijakan *Universal Health Coverage* telah berhasil dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat di Semarang (Aisyah et al., 2022). Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini berupaya memetakan solusi dengan agenda *setting* dalam menyelesaikan permasalahan pada pelayanan BPJS. Artikel ini meninjau permasalahan terkait pelayanan BPJS yang sering ditemukan oleh masyarakat, lalu temuan tersebut dianalisis untuk mengetahui agenda *setting* dan peran para aktor dalam pembangunan kesehatan secara global. Artikel ini mengkaji mengenai 1) Agenda *setting* ketahanan kesehatan masyarakat dalam konteks pembangunan kesehatan secara global di Indonesia; dan 2) Peran aktor kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui peran BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan bagian dari tahapan pengabdian sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui kebijakan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.

Literature Review

Agenda *setting*

Agenda *setting* atau agenda kebijakan merupakan proses di mana opini publik membentuk pemahaman terhadap suatu isu yang kemudian menjadi masalah penting, baik bagi masyarakat umum maupun pemerintah. Proses ini kemudian mendorong pembentukan kebijakan publik seperti yang disampaikan Widodo dalam "*Analisis kebijakan publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*". Proses penyusunan agenda kebijakan terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Masalah Pribadi (*Private Problems*): Tahap pertama dimulai dengan munculnya masalah dalam masyarakat. Namun, masalah ini awalnya dianggap sebagai masalah pribadi yang dampaknya terbatas atau hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.
2. Masalah Publik (*Public Problems*): Ketika masalah yang muncul semula sebagai masalah pribadi melibatkan banyak orang dan memiliki dampak yang lebih luas, masalah ini berubah menjadi masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang memiliki dampak yang signifikan, termasuk orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.
3. Isu Publik (*Public Issues*): Ketika masalah publik menjadi perdebatan di masyarakat, tahap isu publik dimulai. Isu publik adalah masalah publik yang memicu perbedaan pendapat dan konflik di masyarakat mengenai persepsi dan solusi terhadap masalah tersebut.

4. Agenda Sistemik (*Systemic Agenda*): Agenda ini mencakup semua isu yang secara umum dipersepsikan oleh anggota masyarakat politik sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian publik dan berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
5. Agenda Kelembagaan (*Institutional Agenda*): Agenda ini terdiri dari serangkaian masalah yang memerlukan pertimbangan serius dari pembuat keputusan yang berwenang.

Agenda *setting* memainkan peran penting dalam merangsang pembentukan kebijakan alternatif dan menentukan kebijakan yang akhirnya diadopsi. Para aktor kebijakan berperan dalam mempengaruhi setiap tahap agenda *setting* (Maman et al., 2016). Proses agenda *setting* melibatkan tiga tahapan utama:

1. Persepsi *Stakeholders*: Persepsi *stakeholders* tentang isu-isu publik yang menjadi masalah publik adalah langkah pertama dalam proses agenda *setting*.
2. Pengelompokan Masalah: Tahap kedua adalah ketika masalah publik mulai difokuskan dan didefinisikan secara lebih spesifik.
3. Mendorong Agenda Kebijakan: Tahap ketiga adalah ketika masalah publik akhirnya menjadi agenda kebijakan dan kebijakan mulai diformulasikan sebagai respons terhadap masalah tersebut.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat menjadi fokus perhatian pemerintah. Teori ini memiliki dua aspek yaitu aspek partisipan/aktor dan aspek proses (Satiadarmanto et al., 2022). Pada aspek proses, terdapat tiga arus utama seperti yang disampaikan Winarno pada “*Kebijakan Publik Era Globalisasi*”:

1. Arus Masalah (*Problem Stream*): Arus ini berkaitan dengan persepsi masalah publik dan mengidentifikasi perlunya tindakan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.
2. Arus Kebijakan (*Policy Stream*): Arus ini merujuk pada upaya peneliti, komunitas kebijakan, dan para ahli dalam merumuskan solusi terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, masalah publik mulai menjadi masalah institusional, dan proses kebijakan masuk ke dalam agenda kebijakan.
3. Arus Politik (*Political Stream*): Arus ini mencakup faktor-faktor politik seperti perubahan kondisi nasional, perubahan dalam administrasi pemerintahan, dan tekanan dari kelompok kepentingan. Semua ini dapat mempengaruhi perhatian terhadap suatu masalah dan upaya perubahan.

Ketika suatu masalah telah diidentifikasi, solusi tersedia, dan kondisi politik mendukung perubahan, maka masalah tersebut semakin jelas dalam perhatian publik dan peristiwa-peristiwa tertentu akan membuka jendela kebijakan (*policy window*) untuk perubahan.

METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai proses untuk menghimpun data dari berbagai sumber. Metode ini merupakan salah satu bagian dari tahapan yang dilakukan oleh peneliti pada kegiatan pengabdian. Data primer yang digunakan yaitu sumber dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian sumber-sumber tersebut diolah menggunakan analisis isi dengan cara membaca sumber tersebut dan menuliskan hal-hal yang penting melalui proses pemilahan, perbandingan, serta penambahan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk narasi sehingga data bersifat komprehensif. Hasilnya kemudian menjadi *output* salah satu tahapan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan.

RESULTS AND DISCUSSION

Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagian besar pesertanya adalah mereka yang sebelumnya terdaftar dalam program-program pemerintah sebelumnya, seperti Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal. Jamkesmas dan Jamkesda khusus untuk fakir miskin dan warga kurang mampu. Mereka yang terdaftar dalam program ini kemudian menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka memiliki kartu identitas KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan iuran bulannya disubsidi oleh pemerintah. Agenda *setting* dalam konteks BPJS Kesehatan sangat terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan publik. Masalah kesehatan adalah salah satu isu yang selalu relevan dalam politik dan kebijakan publik. Salah satu agenda utama adalah mengatasi kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah sebab ketidaksetaraan akses kesehatan dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih besar (Ardinata, 2020).

BPJS Kesehatan berkaitan dengan pelayanan publik sehingga, masalah kepesertaan BPJS Kesehatan pun berhubungan dengan pelayanan dasar sosial (Solechan, 2019). Ini termasuk aspek kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar warga negara yaitu hak atas layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas (Koswara, 2018). Keterlibatan aktor-aktor kebijakan dalam pembangunan kesehatan publik menjadi salah satu titik fokus dalam agenda *setting*. Para aktor ini termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga terkait, dan pihak swasta yang terlibat dalam sektor kesehatan. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam implementasi program BPJS Kesehatan dan juga dalam pengambilan keputusan terkait perubahan kebijakan kesehatan (Maman et al., 2016).

Faktor proses memainkan peran penting dalam agenda *setting*. Masalah kesehatan masyarakat dapat menjadi isu publik berdasarkan urgensi dan tindakan pemerintah dalam menangani masalah ini. Misalnya, ketika terjadi wabah penyakit atau masalah kesehatan yang mendesak, hal ini dapat dengan cepat menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks BPJS Kesehatan, perubahan dalam jumlah peserta dan jenis kepesertaan yang beragam menjadi indikator penting dalam agenda *setting*. Peningkatan jumlah peserta menunjukkan bahwa program ini berhasil menarik minat masyarakat. Namun, tantangan muncul seiring dengan bertambahnya peserta, seperti pengelolaan klaim Rumah Sakit yang semakin kompleks. Masalah kesehatan masyarakat tidak hanya terbatas pada *individual problems*, tetapi juga mencakup *public problems*.

Salah satu contoh *public problems* adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses pendaftaran BPJS Kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Ini menjadi masalah publik karena akses yang terbatas dapat menghambat hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. *Privat problems* juga menjadi bagian dari masalah kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penggunaan obat-obatan di luar yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Meskipun ada cakupan BPJS Kesehatan, beberapa pasien mungkin masih memilih untuk menggunakan obat-obatan pribadi. Ini menjadi masalah publik karena dapat berdampak pada efektivitas pengobatan dan pengeluaran pribadi yang tinggi. Isu-isu publik berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam merespons masalah kesehatan publik. Terkadang, masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan. Ini dapat mempengaruhi penyelesaian oleh aktor kebijakan dan memicu perdebatan yang luas.

Keterbatasan BPJS Kesehatan perlu dipertimbangkan dalam konteks agenda *setting*. Program ini harus melayani cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Ini dapat menjadi tantangan dalam mengelola dan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, masalah pembayaran klaim yang belum sesuai waktu juga dapat mempengaruhi hubungan antara BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan pihak yang mendapatkan layanan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah langkah. Ini termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan pegawai rumah sakit, dan kontrol terhadap pemberitaan media. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan program BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Implikasi peran BPJS Kesehatan pada rumah sakit terhadap ketahanan masyarakat dapat diuraikan dalam tiga aspek utama. Pertama, pembiayaan BPJS Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui program penyuluhan dan pengelolaan faktor risiko penyakit. Kedua, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial yang melibatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dari perubahan sosial yang terjadi dalam era globalisasi. Ketiga, keberadaan BPJS Kesehatan memberikan keamanan ekonomi tambahan bagi masyarakat, meskipun kondisi ekonomi mereka tetap rentan terhadap perubahan. Selain itu, rumah sakit perlu memiliki kesiapan baik sebagai institusi dalam menjalankan program BPJS Kesehatan yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut (Widada et al., 2017).

Efektivitas BPJS dirasa masih belum optimal dan menjadi isu publik karena berdampak langsung pada akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu peran aktif dari berbagai aktor, baik pemerintah, tenaga medis, maupun masyarakat. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, beberapa kegiatan lanjutan yang bisa dilakukan yakni:

1. Edukasi dan sosialisasi Program BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
2. Pelatihan literasi kesehatan dan administrasi layanan kesehatan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS
3. Kolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis lokal
4. Pembuatan media informasi dan kampanye digital

Dengan mengintegrasikan hasil penelitian dengan kegiatan pengabdian diharapkan masyarakat tidak hanya lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun sistem pelayanan yang lebih adil, terbuka, dan profesional (Ningsih et al., 2022).

CONCLUSION

Dalam konteks peran BPJS Kesehatan terhadap ketahanan masyarakat terdapat empat upaya utama yang perlu diperhatikan. Pertama, BPJS Kesehatan berusaha memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan kesulitan ekonomi, namun, masih terdapat kendala terkait ketersediaan obat-obatan di luar daftar resmi BPJS, yang menimbulkan beban tambahan bagi pasien yang kurang mampu. Kedua, peningkatan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit berdampak positif pada ketersediaan layanan kesehatan. Ketiga, perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, mengatasi masalah kompetensi pegawai BPJS dan rumah sakit, serta menyederhanakan proses pelayanan. Keempat, upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait adalah langkah positif. Namun, masih terdapat tantangan terkait peralatan laboratorium dan kurangnya pembiayaan untuk penyuluhan kesehatan. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian dengan kegiatan pengabdian diharapkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan serta berperan aktif dalam membangun sistem pelayanan yang lebih adil, terbuka, dan profesional

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Aisyah, S., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2022). Implementasi Kebijakan universal health coverage untuk mengatasi masalah kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 195-215.

- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319-332.
- Koswara, I. Y. (2018). Perlindungan tenaga kesehatan dalam regulasi perspektif bidang kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 1-18.
- Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8.
- Maman, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda setting dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 66-94.
- Ningsih, E. S., Nengsih, D. F., Saryanto, F. S., Larasati, I., Nurvirginiawati, A., Aisyah, N. A., ... & Hidayah, N. (2022). Edukasi BPJS Kesehatan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat Dusun Kejambon Kidul terhadap asuransi kesehatan. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-13.
- Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional sebagai program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), 80-97.
- Satiadarmanto, D. F., Litofia, A., Purnajaya, H., & Siregar, M. T. H. (2022). Metode omnibus law agenda setting kebijakan penataan daerah di Kota Pagar Alam-Sumatera Selatan. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 236-252.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Widada, T., Pramusinto, A., & Lazuardi, L. (2017). Peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan implikasinya terhadap ketahanan masyarakat (studi di rsud hasanuddin damrah manna kabupaten bengkulu selatan, provinsi bengkulu). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 199-216.